



Jejak Dualisme Pendidikan: dari Pendidikan Eropa hingga Pesantren di Awal Abad ke-20

Muhamad Ihsan Khuluki^{1*}, Renata Fifa Aulia², Fauziyah Zalfa Attazqiya³, Sutrimo Purnomo⁴

¹⁻⁴Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: muhamadihsankhuluki@gmail.com^{1*}, trimo@uinsaizu.ac.id²⁻⁴

*Penulis Korespondensi: muhamadihsankhuluki@gmail.com

Abstract. *Educational dualism is a phenomenon that emerged in the Indonesian education system since the Dutch colonial era, which separated Western education from indigenous education. Western education introduced by the colonial government was more oriented towards colonial administrative and economic interests, and was generally intended for Europeans and indigenous elites such as the priyayi class. Meanwhile, indigenous communities widely developed religious-based education through Islamic boarding schools (pesantren) institutions that gave birth to communities of santri (Islamic students). This study aims to analyze the forms of educational dualism in the early 20th century by reviewing three developing educational models: European education, priyayi education, and santri education. The method used is a literature study by examining various books, scientific journals, and historical sources relevant to the development of education during the colonial period. The results of the study indicate that European education functioned as a means of developing an educated workforce that supported the colonial administration, while priyayi education became a path of social mobility for indigenous elites who acted as intermediaries between the colonial government and society. On the other hand, santri education through Islamic boarding schools developed independently and played an important role in maintaining religious values and the cultural identity of the community. Thus, the dualism of education during the colonial period not only reflected the inequality of access to education, but also shaped the social structure and intellectual dynamics of Indonesian society in the early 20th century.*

Keywords: Colonial Education; Educational Dualism; Islamic Boarding School; Priyayi; Santri.

Abstrak. Dualisme pendidikan merupakan fenomena yang muncul dalam sistem pendidikan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, yang memisahkan antara pendidikan Barat dan pendidikan pribumi. Pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial lebih berorientasi pada kepentingan administrasi dan ekonomi kolonial, serta umumnya diperuntukkan bagi orang Eropa dan kalangan elite pribumi seperti golongan priyayi. Sementara itu, masyarakat pribumi secara luas mengembangkan pendidikan berbasis keagamaan melalui lembaga pesantren yang melahirkan komunitas santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dualisme pendidikan pada awal abad ke-20 dengan meninjau tiga model pendidikan yang berkembang, yaitu pendidikan Eropa, pendidikan priyayi, dan pendidikan santri. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, serta sumber sejarah yang relevan dengan perkembangan pendidikan pada masa kolonial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Eropa berfungsi sebagai sarana pembentukan tenaga kerja terdidik yang mendukung administrasi kolonial, sedangkan pendidikan priyayi menjadi jalur mobilitas sosial bagi elite pribumi yang berperan sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan santri melalui pesantren berkembang secara mandiri dan berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan serta identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, dualisme pendidikan pada masa kolonial tidak hanya mencerminkan ketimpangan akses pendidikan, tetapi juga membentuk struktur sosial dan dinamika intelektual masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20.

Kata kunci : Dualisme Pendidikan; Pendidikan Kolonial; Pesantren; Priyayi; Santri.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Dalam konteks sejarah Indonesia, sistem pendidikan mengalami perubahan yang signifikan terutama pada masa kolonial Belanda. Pendidikan pada masa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang

digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatur struktur sosial masyarakat. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap eksploitasi kolonial yang terjadi sebelumnya. Salah satu program utama dalam politik etis adalah pengembangan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah kolonial mulai mendirikan berbagai sekolah yang ditujukan bagi penduduk lokal, meskipun aksesnya tetap terbatas pada kelompok tertentu (Kusmayadi, 2017).

Meskipun demikian, sistem pendidikan kolonial tetap menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara pendidikan untuk orang Eropa dan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah dengan kurikulum Barat lebih banyak diperuntukkan bagi anak-anak Eropa atau kalangan elite pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi pada umumnya hanya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan pemerintah kolonial. Selain pendidikan kolonial yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, masyarakat pribumi juga memiliki sistem pendidikan sendiri yang berkembang secara tradisional. Pendidikan Islam melalui lembaga pesantren telah ada jauh sebelum kedatangan kolonial dan tetap bertahan selama masa penjajahan. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan nilai moral, budaya, dan identitas sosial masyarakat (Norvaizi dan Khoiri, 2025).

Dengan adanya dua sistem pendidikan yang berkembang secara bersamaan, yaitu pendidikan Barat dan pendidikan tradisional, muncul fenomena yang dikenal sebagai dualisme pendidikan. Dualisme ini mencerminkan adanya perbedaan tujuan, kurikulum, dan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dualisme pendidikan pada awal abad ke-20 dengan meninjau tiga bentuk pendidikan yang berkembang pada masa tersebut, yaitu dualisme pendidikan, pendidikan Eropa, pendidikan priyayi, dan pendidikan santri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku sejarah, artikel jurnal akademik, serta dokumen sejarah yang membahas tentang dualisme pendidikan Eropa dan Pribumi pada awal abad 20. Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur, sehingga menghasilkan pemahaman historis yang sistematis dan

mendalam tentang bagaimana dualisme pendidikan Barat dan pribumi terbentuk pada awal abad ke-20 serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. yang sistematis dan mendalam tentang dinamika transformasi pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa landasan konseptual yang kuat untuk mendukung pembahasan arah kebijakan pendidikan nasional di masa depan (Snyder, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah Dualisme Pendidikan

Dualisme adalah keadaan yang terdiri dari dua hal atau sepasang (Matovu, 2013). Secara etimologis, kata “dualisme” berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan dari kata dualis atau duo yang berarti dua, dan ismus atau isme yang berfungsi membentuk kata kerja. Dengan demikian, dualisme dapat dimaknai sebagai dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologis, dualisme diartikan sebagai dua paham atau prinsip yang berbeda dan saling berlawanan, sehingga membentuk suatu sistem atau teori yang didasarkan pada dua substansi yang berbeda (Basyit, 2019).

Sementara itu, pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*paedagogie*” yang tersusun dari kata “*paes*” (anak) dan “*ogogos*” (membimbing). Sehingga bermakna bimbingan yang dilakukan terhadap anak (R. Hidayat dan Abdillah, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan kata turunan dari “didik” yang mendapatkan imbuhan awalan pe- dan akhiran -an, yang menunjukkan proses atau cara dalam mendidik. Oleh karena itu, pendidikan didefinisikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam rangka mendewasakan melalui proses pengajaran dan pelatihan (Fauzi dan Triono, 2021). Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi tersebut mencakup kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara (Nursalim, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut, dualisme pendidikan mengacu pada keadaan kondisi terdapat dua sistem pendidikan yang berbeda dalam proses pembelajaran siswa di sekolah (Matovu, 2013). Salah satu ciri umum politik pendidikan kolonial Belanda yaitu penerapan dualisme pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi (Syaharuddin dan Susanto, 2019). Sistem ini sengaja dirancang untuk menciptakan stratifikasi sosial. Pendidikan Belanda

diperuntukkan bagi golongan Eropa dan sebagian kecil kaum elit pribumi, dengan fasilitas yang memadai, serta penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sebaliknya, pendidikan bagi masyarakat pribumi diselenggarakan secara terbatas, baik dari segi akses, kualitas, maupun tujuan lebih diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja rendahan daripada mengembangkan kemampuan intelektual secara menyeluruh.

Dualisme pendidikan juga terlihat dalam pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum sekuler Barat telah muncul sejak masa kolonial di Indonesia. Sistem ini membagi pendidikan menjadi ke dalam dua jalur, yaitu pendidikan agama yang berkembang di pesantren dan madrasah, serta pendidikan umum yang menggunakan model Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Sejak pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial mulai menyelenggarakan pendidikan Barat bagi orang Belanda dan sebagian kecil masyarakat pribumi dari kalangan elite, sementara pendidikan agama tetap diselenggarakan oleh masyarakat. Kebijakan politik etis yang kemudian memperluas akses pendidikan hingga ke pedesaan semakin mempertegas pemisahan antara sekolah umum milik pemerintah dan sekolah agama milik rakyat (Yumnah et al., 2025).

Dualisme pendidikan yang merupakan warisan kolonial ini menjadi salah satu penyebab munculnya kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan agama menyebabkan perbedaan orientasi kurikulum serta peluang sosial bagi para lulusannya. Lulusan sekolah umum yang berbasis ilmu modern cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menduduki posisi elit di masyarakat, seperti dokter, pengacara, atau birokrat. Sebaliknya, lulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berperan dalam bidang keagamaan, seperti menjadi kiai, ustaz, imam, atau dai. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pendidikan agama memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pendidikan umum (Nasution, 2022). Dualisme tersebut juga tercermin pada perbedaan kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Sebagian lembaga mengadopsi kurikulum nasional dengan tambahan mata pelajaran agama, sementara yang lain menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama pembelajaran. Ada pula lembaga yang menekankan pendidikan agama secara menyeluruh tanpa mengintegrasikan secara signifikan mata pelajaran modern. Meskipun demikian, pendidikan Islam umumnya memiliki keunggulan dalam penanaman nilai akhlak dan pembentukan karakter. Setelah kemerdekaan, dualisme pendidikan masih terlihat dalam kebijakan pendidikan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah mendirikan Universitas Gadjah Mada sebagai representasi pendidikan tinggi nasionalis, serta Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun, seiring diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, posisi

madrrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama mulai berkurang, meskipun secara administratif keduanya masih berada di bawah lembaga yang berbeda. Dalam perkembangan, integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern menjadi kebutuhan penting. Kurikulum pendidikan Islam perlu dirancang secara holistik dengan memadukan nilai-nilai keagamaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan profesional (Yumnah et al., 2025). Pengelolaan kurikulum dapat dilakukan melalui manajemen berbasis madrasah dengan memperhatikan evaluasi kurikulum yang pernah diterapkan, seperti KTSP, Kurikulum 2013, dan kurikulum berbasis KKNI.

Pelaksanaan kurikulum harus berlandaskan prinsip produktivitas, demokratisasi, kerja sama, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, pelaksanaannya juga harus melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan kontekstual, diharapkan dualisme pendidikan dapat diminimalisasi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga kompetensi akademik dan profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Eropa (Masa Kolonial)

Masuknya Belanda ke Indonesia bertujuan untuk membentuk daerah penguasaan (koloni) sekaligus memenuhi kepentingan ekonomi dan politik. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan Barat bagi penduduk pribumi. Pendidikan ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam sistem administrasi modern dengan gaji yang lebih baik. Oleh karena itu, sekolah-sekolah model Barat banyak diminati terutama oleh anak-anak priyayi dan bangsawan pribumi. Sistem pendidikan tersebut juga dijadikan sarana untuk melatih anak-anak bangsawan agar dapat menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Belanda menetapkan beberapa prinsip sebagai dasar kebijakan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu; (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial; (3) Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.; (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial (Pakar, n.d.). Pada masa tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mendukung kepentingan penjajah. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial Masyarakat, sehingga

akses pendidikan lebih diutamakan bagi anak-anak bangsawan, tokoh terkemuka, dan pegawai kolonial. Pendidikan yang diterapkan berlandaskan budaya dan pengetahuan Barat. Pemerintah Hindia Belanda juga menjalankan kebijakan pendidikan yang bersifat terbatas dan diskriminatif sebagai bagian dari upaya memerintah masyarakat Indonesia secara tidak langsung.

Dalam konteks pelaksanaan Politik Etis, kebijakan pendidikan sebenarnya lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang administrasi, teknik, dan kejuruan. Sistem Pendidikan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersifat dualistis, baik dalam penggunaan bahasa pengantar maupun sistem pengajarannya. Pada masa itu terdapat empat jenis sekolah, yaitu sekolah Eropa, sekolah pribumi berbahasa Belanda, sekolah pribumi berbahasa daerah, dan sekolah dengan sistem pendidikan pribumi. Meskipun pada awalnya pendidikan hanya sampai tingkat rendah, pada awal abad ke-20 mulai dibuka sekolah menengah dan pada tahun 1920-an mulai berkembang sekolah tinggi. Namun demikian, karena masih adanya diskriminasi dan elitis, perkembangan pendidikan di Indonesia berlangsung relatif lambat (Latifa, 2016).

Tujuan pendidikan pada masa kolonial sebenarnya tidak pernah dinyatakan secara tegas oleh pemerintah Belanda. Namun, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi kepentingan pemerintahan kolonial. Sebagian besar lulusan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja kasar, staf administrasi, staf teknis, pekerja pertanian, maupun karyawan tingkat rendah lainnya. Seiring dengan perkembangan industri dan sistem pemerintahan kolonial, kebutuhan akan tenaga kerja terdidik semakin meningkat. Dalam praktiknya, pendidikan kolonial menekankan pada penguasaan beberapa mata pelajaran dasar yang dianggap penting untuk menunjang pekerjaan administratif. Mata pelajaran yang wajib diajarkan antara lain membaca, menulis, bahasa, dan berhitung. Bahasa Belanda menjadi salah satu mata pelajaran penting karena digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan kolonial. Sistem persekolahan pada masa kolonial Belanda pada abad ke-20 terdiri atas tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*), pendidikan menengah (*Middlebaar Onderwijs*), dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekolah rendah yang menggunakan bahasa Belanda dan sekolah rendah yang menggunakan bahasa daerah atau Melayu sebagai bahasa pengantar. Perbedaan ini menunjukkan adanya perlakuan pendidikan yang didasarkan pada status sosial masyarakat (Kusmawati et al., 2023). Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah

dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan (3) Pendidikan tinggi (Pakar, n.d.). Sebagai bagian dari sistem tersebut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Europese Lagere School* (ELS), yaitu sekolah dasar yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan sebagian kecil bangsawan pribumi. Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. ELS pertama kali didirikan pada tahun 1817 di Batavia (Jakarta) dengan lama pendidikan tujuh tahun. Sebelum memasuki ELS, anak-anak umumnya mengikuti pendidikan taman kanak-kanak (*Froebel*) atau sekolah persiapan untuk melatih kemampuan berbahasa Belanda, terutama bagi anak-anak non-Eropa. Batas usia masuk ELS berkisar antara 6 hingga 16 tahun, namun anak-anak Eropa memiliki akses yang lebih mudah dibandingkan anak bumiputera yang harus melalui seleksi ketat.

Meskipun secara resmi membuka kesempatan bagi anak bumiputera, jumlahnya tetap dibatasi melalui berbagai kebijakan seperti pembatasan usia, biaya sekolah yang lebih mahal, serta aturan ketat dalam proses belajar. Selain itu, penerimaan siswa juga sangat mempertimbangkan status sosial orang tua, sehingga mayoritas siswa berasal dari kalangan bangsawan. Kurikulum ELS mencakup berbagai mata pelajaran seperti membaca dan menulis, bahasa Melayu dan Belanda, berhitung, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, serta menggambar. Dalam perkembangannya, bahasa Belanda menjadi mata pelajaran utama dan guru-gurunya banyak didatangkan langsung dari Belanda, meskipun kemudian pemerintah mulai melatih guru bumiputera sebagai guru bantu. Selama beberapa dekade, ELS menjadi sekolah elit dengan standar akademik yang tinggi dan menjadi jalur penting untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, seperti HBS, maupun ke sekolah kedinasan kolonial (Siregar, 2016).

Selain ELS sebagai pendidikan tingkat dasar bagi golongan Eropa dan bangsawan, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan *Hogere Burger School* (HBS) sebagai sekolah menengah yang setara dengan SMA pada masa sekarang. Salah satu HBS didirikan di Surabaya pada tahun 1875. Sistem pendidikan di HBS disesuaikan dengan sistem pendidikan di Belanda, baik dari segi kurikulum maupun peraturan yang berlaku. Pada tahun 1880, sekolah ini memiliki sekitar 278 siswa dengan 5 orang guru. Dalam perkembangannya, lokasi sekolah sempat berpindah, antara lain ke Jalan Regenstraat (Kebon Rejo) pada tahun 1912 dan ke Jalan Ketabang pada tahun 1923, dengan lama pendidikan lima tahun.

Kurikulum HBS menekankan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Belanda yang memiliki jumlah jam pelajaran paling banyak. Hal ini bertujuan agar siswa, khususnya anak-anak Eropa, tidak mengalami kesulitan jika melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selain bahasa Belanda, diajarkan pula bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris. Mata pelajaran lain

seperti berhitung dan aljabar juga diajarkan, terutama pada kelas awal. Namun, biaya pendidikan di HBS tergolong sangat mahal bagi masyarakat pribumi. Sebagai contoh, tokoh nasional Soekarno yang pernah bersekolah di HBS Surabaya pada tahun 1917–1922 harus membayar sekitar f 15,00 setiap bulan untuk uang sekolah dan f 75,00 setiap tahun untuk buku. Biaya tersebut cukup berat bagi keluarga pribumi, mengingat penghasilan rata-rata pegawai saat itu jauh lebih kecil (Muhammad dan Salindri, 2015).

Pendidikan Priyayi

Istilah *priyayi* berasal dari kata *para yayi* (para adik), yaitu adik dari raja. Dalam masyarakat Jawa, istilah ini dijelaskan melalui *jarwa dhosok* (etimologi rakyat) yang mengaitkan maknanya dengan kedudukan sosial tertentu. Namun demikian, keabsahan etimologi tersebut sulit dipastikan, karena bentuk kata “*priyayi*” tidak ditemukan dalam literatur sebelum abad ke-19 (Kartodirdjo et al., 1987).

Dalam naskah *Nitisruti* dan *Serat Nitipraja*, para abdi raja lebih dikenal dengan *mantri* atau *punggawa*. Meskipun demikian, masyarakat kemudian memahami bahwa istilah *priyayi* yang berasal dari kata *para yayi* menunjukkan bahwa kata ini digunakan untuk orang-orang yang terhormat, berwibawa dan dekat dengan pejabat yang paling tinggi (Kartodirdjo dkk., 1987). Kajian mengenai golongan priyayi di Jawa telah banyak dilakukan, baik oleh akademisi asing maupun Indonesia. Di antara peneliti asing yang mengkaji priyayi adalah R. van Niel, Leslie H. Palmer, Clifford Geertz, dan lainnya. Sementara itu, akademisi Indonesia yang turut mengkaji topik ini antara lain Kuntjaraningrat, Soemarsaid Moertono dan Savitri Scherer. Menurut van Niel, sekitar tahun 1900 golongan priyayi merupakan kelompok elit dalam masyarakat Jawa. Mereka berada di atas rakyat jelata dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan sosial. Mereka memberikan pengaruh, mengatur, dan menuntun masyarakat. Priyayi berfungsi memberikan pengaruh, mengatur, dan membimbing masyarakat. Kelompok ini mencakup para administrator, pegawai pemerintah, serta individu berpendidikan yang memiliki status sosial tinggi. Dalam pandangannya, priyayi tidak semata ditentukan oleh faktor keturunan, karena pemerintah kolonial tidak sepenuhnya menerapkan prinsip *erfelijkheidsbeginsel* (prinsip keturunan) dalam kebijakan kepegawaian. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk menjadi priyayi melalui jabatan dalam birokrasi (Van Niel, 1960).

Berbeda dengan Van Niel, Palmier mengemukakan bahwa latar belakang keturunan merupakan faktor penting dalam menentukan status kepriyayian. Dia menjelaskan bahwa priyayi adalah keturunan dari bupati, sehingga latar belakang keturunan menjadi penentu utama. Berdasarkan hal tersebut, priyayi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu priyayi luhur dan

priyayi kecil. Priyayi luhur merupakan golongan priyayi yang “sejati”, yang dapat dilihat dari jabatan ayah, asal keturunan ibu, serta latar belakang keluarga pasangan. Sementara itu, priyayi kecil adalah mereka yang memperoleh status priyayi melalui jabatan dalam administrasi pemerintahan. Golongan ini tidak selalu berasal dari keturunan bangsawan, karena individu dari kalangan rakyat biasa juga dapat menjadi priyayi melalui jasa dan loyalitas kepada penguasa. Umumnya, mereka menempuh proses seperti suwita atau ngenger serta menjalani masa magang.

Sementara itu, Geertz memandang golongan priyayi sebagai kelompok elit birokrasi yang akarnya telah ada sejak masa kerajaan Hindu-Jawa sebelum kolonialisme. Mereka menjaga dan mengembangkan etika kraton yang sangat halus, serta kesenian dalam bidang tari, teater, musik, sastra, dan juga mistisisme Hindu. Priyayi berfungsi sebagai pelestari budaya warisan kraton yang ada di masa lalu. Pada periode sebelum Perang Dunia II, kelompok sosial priyayi memiliki kekuasaan yang besar, sehingga pola kebudayaan mereka menjadi norma umum. Sikap dan pandangan mereka menjadi acuan bagi perilaku dan pandangan hidup yang dianggap baik dan ideal (Kartodirdjo et al., 1987).

Savitri Scherer mengidentifikasi golongan priyayi sebagai pegawai dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring dengan meluasnya pendidikan Barat dan meningkatnya kepentingan kolonial di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lalu golongan priyayi ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah golongan priyayi birokrasi, yaitu mereka yang mengisi jabatan-jabatan pangrehpraja dan melanjutkan warisan priyayi lama. Jabatan-jabatan ini umumnya juga diisi oleh anak keturunan priyayi lama yang telah mendapatkan pendidikan modern. Kedua, golongan priyayi profesional, yaitu yang menempati jabatan di pemerintahan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu, karena berkaitan erat dengan kepentingan yang berhubungan dengan eksploitasi kolonial, seperti bidang kesehatan, peternakan, pertanian dan irigasi, serta industri dan lain-lain. Kuntjaraningrat menyatakan bahwa sebelum Perang Dunia II, istilah priyayi identik dengan pegawai negeri. Pada masa tersebut, terdapat perbedaan antara priyayi pangrehpraja dan priyayi bukan-pangrehpraja. Priyayi pangrehpraja terdiri dari para pejabat Pemerintah Daerah, yaitu orang-orang yang dianggap paling berpengaruh dan memiliki status tertinggi di antara priyayi lainnya, karena sifat kebangsawanan mereka. Sedangkan golongan priyayi yang kedua adalah orang-orang yang berpendidikan, serta berasal dari daerah pedesaan atau kelompok tiyang alit di kota yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pegawai negeri melalui pendidikan. Soemarsaid Moertono mengungkapkan bahwa priyayi merupakan lapisan sosial yang berada di antara raja dan para bendara (keturunan raja) serta rakyat kebanyakan. Walaupun masyarakat Jawa

memiliki kelas elit yang terbuka, pejabat-pejabat kerajaan secara tradisional diambil dari kalangan priyayi, yakni kelompok sosial yang pada dasarnya terdiri dari para punggawa (pejabat), meskipun dalam perkembangan selanjutnya juga melibatkan anggota keluarga dan keturunannya. Namun, syarat utama untuk menjadi bagian dari golongan priyayi tetap melalui jalur dinas di kerajaan (Kartodirdjo et al., 1987).

Perkembangan Pendidikan Priyayi pada Masa Kolonial

Memasuki dekade 1920-an, terjadi perubahan penting dalam struktur golongan priyayi dengan munculnya generasi baru yang dikenal sebagai *homines novi* atau “orang-orang baru”. Kelompok ini umumnya berasal dari kalangan terdidik yang telah menamatkan pendidikan menengah dan kemudian menduduki berbagai jabatan teknis dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda, seperti di bidang kedokteran, pertanian, peternakan, pendidikan, pengadilan, dan administrasi pemerintahan (Kartodirdjo et al., 1987). Mereka merupakan generasi pertama dalam keluarga yang memperoleh pendidikan modern dan memasuki birokrasi kolonial melalui jalur pendidikan formal.

Perkembangan pendidikan pada masa kolonial turut membuka peluang mobilitas sosial di kalangan masyarakat pribumi, terutama melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian, akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih banyak dinikmati oleh golongan priyayi. Beberapa jenis sekolah yang berkembang pada masa itu antara lain *Sekolah Ongko Loro*, *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Europeesche Lagere School* (ELS), dan *Schakelschool*. *Sekolah Ongko Loro* diperkenalkan tidak hanya sebagai respons terhadap desakan kaum sosialis di Belanda, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga pegawai negeri tingkat rendah dalam administrasi pemerintahan (Nugroho, 2008). *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) terbagi menjadi dua jenis, yaitu HIS negeri dan HIS subsidi, dengan masa belajar selama tujuh tahun serta menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada awalnya, HIS hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan atau elit pribumi, tetapi kemudian mulai terbuka bagi anak-anak dari lapisan masyarakat yang lebih luas seiring dengan diterapkannya Politik Etis (Apriyana et al., 2022). Selain itu, terdapat pula *Europeesche Lagere School* (ELS), yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan kalangan priyayi, yang juga pernah diikuti oleh salah satu tokoh nasional Indonesia, R.A. Kartini (Arif dkk., 2014). Di Surabaya, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah peralihan (*Schakelschool*) pada tahun 1930 di Jl. *Van Riebeecklaan* (kini Jl. WR Supratman), dengan sistem pembayaran uang sekolah yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan orang tua murid (Muhammad dan Salindri, 2015).

Pendidikan Santri

Istilah pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran -an yang berarti tempat tinggal santri. Senada dengan hal tersebut, Soegarda Poerbakawatja menyebutkan bahwa pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam. Dengan demikian, pesantren dapat dimaknai sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk mempelajari agama Islam (Daulay, 2004).

Sementara itu, asal-usul kata santri setidaknya memiliki dua pendapat yang sering dijadikan rujukan. Pertama, berasal dari bahasa Sanskerta śāstri yang berarti melek huruf atau orang yang memiliki pengetahuan. Kedua, berasal dari bahasa Jawa cantrik, yaitu seseorang yang mengikuti seorang guru atau ustadz ke mana pun pergi atau menetap bersamanya dengan tujuan mempelajari suatu ilmu. Oleh karena itu, santri dapat dipahami sebagai individu yang mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam secara taat (M. Hidayat, 2016).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan keagamaan masyarakat. Ciri-ciri utama pendidikan pesantren antara lain adanya kyai (pemimpin agama), santri (siswa), masjid, asrama, serta pembelajaran teks-teks Islam klasik (kitab kuning) sebagai sumber belajar utama (Budiharso et al., 2023). Unsur-unsur tersebut menjadi ciri khas yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri, yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap di lingkungan pesantren, sedangkan santri kalong merupakan santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren dan tidak menetap, melainkan hanya datang untuk belajar dan mengaji (M. Hidayat, 2016). Kemudian lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren, sekurang-kurangnya ada unsur-unsur: Kiyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari Kiyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, shalat berjama'ah dan sebagainya (Bawani, 1993). Santri dan pesantren memiliki keterkaitan yang erat dalam sejarah pendidikan Islam. Oleh karena itu, untuk memahami peran dan kedudukannya dalam masyarakat, perlu ditinjau sejarah perkembangan santri dan pesantren dalam konteks sosial dan pendidikan di Indonesia. Para ahli sejarah Islam menyepakati bahwa pesantren pertama kali muncul di Pulau Jawa, dipelopori oleh tokoh Walisongo. Pendapat yang paling kuat menyebutkan Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) sebagai pendiri pertama yang memprakarsai lembaga pengajian di Gresik pada abad ke-14 untuk mendidik santri menjadi juru dakwah yang terampil (Anjani et al., 2025). Lembaga inilah yang kemudian berkembang menjadi pesantren, tempat para santri mempelajari ilmu-ilmu keislaman di bawah bimbingan seorang kiai. Melalui sistem pendidikan ini, pesantren berperan penting dalam membentuk komunitas santri yang menjadi

bagian dari jaringan penyebaran Islam di Nusantara. Pada awal perkembangannya, fungsi pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim atau santri, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT (Maesaroh & Achdiani, 2017). Para santri belajar bahasa Arab agar dapat memperdalam buku-buku tentang fiqh, ushul fiqh, hadits, adab, tafsir, tauhid, tarikh, tasawuf, dan akhlaq (Dhofier, 2011). Metode pembelajaran di pesantren umumnya menggunakan metode tradisional seperti bandongan dan sorogan, yang menekankan hubungan langsung antara kiai dan santri dalam proses pendidikan (Kamal, 2020). Metode ini memungkinkan terjadinya proses transmisi ilmu pengetahuan keislaman dari generasi ke generasi secara berkelanjutan.

Pada masa kolonial, pesantren tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang. Di saat sekolah-sekolah kolonial lebih banyak diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti kaum priyayi. Lalu anak-anak dari kalangan non-priyayi (pribumi) hanya memiliki akses terbatas ke sekolah dan sebagian besar bahkan tidak bersekolah sama sekali (Aziz, 2025). Adanya pesantren justru menjadi lembaga pendidikan yang terbuka bagi masyarakat luas. Dengan kondisi tersebut, pesantren hadir sebagai alternatif lembaga pendidikan bagi masyarakat. Memasuki abad ke-20, pesantren mulai mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan dinamika pendidikan di Indonesia. Sebagian pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan memasukkan pelajaran umum ke dalam proses pembelajaran. Kurikulum pesantren secara bertahap mengintegrasikan ilmu-ilmu umum seperti matematika, bahasa, dan sains. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam mencetak ahli agama, tetapi juga menyiapkan peserta didik yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat modern (Imamuddin, 2025).

Karakteristik Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Meskipun demikian, pesantren tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah karakteristik utama yang menjadi ciri pendidikan pesantren (Amin, 2015). Pertama, adanya hubungan yang akrab dan dekat antara santri dan kiai, yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan spiritual. Kedua, adanya kepatuhan santri terhadap kiai sebagai figur sentral dalam proses pendidikan. Ketiga, nilai kesederhanaan dan hidup hemat yang benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Keempat, kemandirian menjadi nilai yang sangat ditekankan dalam kehidupan

santri. Kelima, berkembangnya semangat tolong-menolong serta suasana persaudaraan (ukhuwah) yang kuat di antara warga pesantren. Keenam, disiplin menjadi sikap yang sangat dianjurkan dan dibiasakan. Ketujuh, adanya pendidikan mental berupa kesiapan untuk menghadapi kesulitan dan pengorbanan dalam mencapai tujuan.

Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia yang hingga kini masih bertahan di tengah dinamika perkembangan zaman. Salah satu ciri khas yang tetap dipertahankan adalah adanya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan (budaya), kesederhanaan hidup, serta hubungan yang erat antara kiai dan santri. Dalam perkembangannya, sebagian pesantren mulai menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan dengan melakukan pembaruan dalam sistem pendidikannya. Bentuk pembaruan tersebut beragam, mulai dari memberikan kesempatan kepada santri untuk mengikuti pendidikan umum di luar pesantren, hingga melakukan transformasi sistem pendidikan dari model tradisional ke model modern. Beberapa pesantren bahkan mengembangkan program berbasis keterampilan, seperti agribisnis. Selain itu, terdapat pula pesantren yang mulai memperbolehkan penggunaan teknologi, seperti laptop dan telepon seluler, terutama bagi santri yang berstatus mahasiswa. Di sisi lain, pesantren memiliki keunggulan dalam pembentukan karakter, seperti melatih sikap istiqamah (disiplin), membentuk akhlak yang baik, serta menanamkan nilai keberkahan dalam kehidupan. Selama ini, pesantren sering dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan tradisional yang kurang responsif terhadap perubahan. Namun, dalam konteks sistem pendidikan nasional saat ini, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Banyak pesantren telah melakukan transformasi, baik dalam aspek kurikulum, manajemen dan kepemimpinan, metode pengajaran, maupun pendekatan terhadap perkembangan zaman (Amin, 2015). Secara umum metode pembelajaran yang digunakan di pesantren di antaranya adalah sorogan, bandongan (wetonan), musyawarah (mudzakarah), hafalan, dan lalaran. Ada juga metode lain yang kerap digunakan di pesantren. Sorogan, yakni metode belajar individu di mana seorang santri berhadapan langsung dengan kiai atau guru. Teknisnya, seorang santri membaca materi yang telah disampaikan kiai. Selanjutnya kiai membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh santri tersebut mengikuti kiai membaca dan menjelaskan berbagai kitab. Bandongan (Wetonan), yakni metode pembelajaran kelompok dan bersifat klasikal, artinya seluruh santri untuk kelas-kelas tertentu. Musyawarah/mudzakarah, pembelajaran berupa diskusi pelbagai masalah yang ditemukan oleh para santri. Metode ini digunakan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah yang dihadapi. Hafalan, yakni metode untuk menghafal berbagai kitab yang diwajibkan kepada para santri. Dalam praktiknya, metode hafalan merupakan kegiatan kolektif yang diawasi oleh kiai. Lalaran, yakni metode pengulangan materi yang

dilakukan oleh seorang santri secara mandiri. Materi yang diulang merupakan materi yang telah dibahas di dalam sorogan maupun bandongan, untuk memperkuat penguasaan materi. Metode demonstrasi atau praktik ibadah, yakni metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan kemampuan pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan ustaz. Metode riyadlah merupakan metode pembelajaran yang menekankan aspek olahbatin untuk mencapai kesucian hati para santri dengan berbagai cara berdasarkan petunjuk dan bimbingan kiai.

Metode-metode di atas, diaplikasikan dengan berbagai teknik pembelajaran, antara lain sebagai berikut (Fahham, 2020). Teladan (uswah), yakni teknik pembelajaran dengan memberi contoh nyata kepada santri. Teknik ini hampir sama dengan teknik demonstrasi, tapi cakupannya lebih luas, yakni terletak pada semua sisi kehidupan dari seorang kiai atau guru. Pembiasaan (adat), yakni teknik pembelajaran dengan memupuk kebiasaan kepada seorang santri untuk melakukan hal-hal tertentu. Teknik ini dimaksudkan untuk internalisasi atau kristalisasi materi ajar ke dalam diri santri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dualisme pendidikan di Indonesia merupakan kondisi adanya dua sistem pendidikan yang berbeda, yaitu pendidikan umum (warisan Barat) dan pendidikan Islam. Dualisme ini berakar kuat sejak masa kolonial Belanda yang secara sengaja menerapkan sistem pendidikan yang diskriminatif dan berlapis untuk mempertahankan kekuasaan serta menciptakan stratifikasi sosial. Pendidikan Barat diperuntukkan bagi golongan Eropa dan elit pribumi (priyayi), sementara masyarakat umum lebih banyak mengakses pendidikan terbatas atau pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Dalam perkembangannya, pendidikan priyayi cenderung berorientasi pada birokrasi dan kekuasaan dengan dukungan pendidikan formal Barat, sedangkan pendidikan santri melalui pesantren lebih menekankan pada pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan. Kedua sistem ini berkembang secara terpisah namun sama-sama memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dualisme pendidikan antara pendidikan Barat dan pendidikan pribumi tidak hanya mencerminkan perbedaan sistem pendidikan, tetapi juga menggambarkan stratifikasi sosial dalam masyarakat kolonial. Meskipun pendidikan Barat memberikan peluang mobilitas sosial bagi sebagian kecil masyarakat, keberadaan pesantren tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam perkembangan pendidikan nasional selanjutnya diperlukan upaya integrasi

antara ilmu agama dan ilmu modern agar sistem pendidikan mampu menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter moral yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, R. (2015). *Pengembangan pendidikan agama Islam*. PT LKIS Printing Cemerlang.
- Anjani, A. R., Amanah, P., & Chadidjah, S. (2025). Pesantren lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan perkembangannya. *AT-Tabayyun: Journal Islamic Studies*, 7(1).
- Apriyana, S. B., Komariyah, S., & Novriyanto, Y. (2022). Pengaruh kebijakan politik etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 1(1). <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.17>
- Arif, M., Sulthon, A., Munfarida, A., Sumadi, E., & Qudsiyah, F. (2014). *Pendidikan posmodernisme: Telaah kritis pemikiran tokoh pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Aziz, F. M. (2025). Forum for social and humanities studies. *Forum for Social and Humanities Studies*, 1(1).
- Basyit, A. (2019). Dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>
- Bawani, I. (1993). *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*. Al-Ikhlas.
- Budiharso, T., Bakri, S., & Sujito. (2023). Transformation of education system of the pesantren in Indonesia from the Dutch colony to democratic era. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(4), 179–206.
- Daulay, H. P. (2004). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Fahham, A. M. (2020). *Pendidikan pesantren: Pola pengasuhan, pembentukan karakter dan perlindungan anak*. Publica Institute Jakarta.
- Fauzi, & Triono, A. (2021). *Dasar-dasar dan teori pendidikan*. CV Rumah Kreatif Wadas Kelir.
- Hidayat, M. (2016). Model komunikasi kyai dengan santri di pesantren. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(6).
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu pendidikan: Konsep, teori dan aplikasinya*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Imamuddin, T. (2025). Transformasi kurikulum pesantren: Studi literatur tentang pengembangan pendidikan Islam berbasis kebutuhan zaman. *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 1(1), 1–10.
- Kamal, F. (2020). Model pembelajaran sorogan dan bandongan dalam tradisi pondok pesantren. *Jurnal Paramurobi*, 3(2), 15–26.
- Kartodirdjo, S., Sudewo, A., & Hatmosuprobo, S. (1987). *Perkembangan peradaban priyayi*. Gadjah Mada University Press.
- Kusmawati, H., Najib, M. K., Rahmawati, T., & Shofa, D. A. (2023). Perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan II (abad 20 termasuk masa pendudukan

- Jepang). *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 219–227.
- Kusmayadi, Y. (2017). Sejarah perkembangan pendidikan di Priangan 1900–1942. *Jurnal Artefak: History and Education*, 4(2), 141–152.
- Latifa, U. M. I. (2016). Perkembangan pendidikan modern di Yogyakarta masa kolonial Belanda pada tahun 1900–1942. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 1028–1034.
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas dan fungsi pesantren di era modern. *SOSIETAS*, 7(1), 346–352.
- Matovu, M. (2013). Education dualism and secularism: An integrated education approach to the education system in Uganda. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, 5(2), 117–132.
- Muhammad, G. P., & Salindri, D. (2015). Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901–1942. *Publika Budaya*, 1(3), 20–34.
- Nasution, A. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Mengulas esensi dan struktur pendidikan*. Guepedia.
- Norvaizi, I., & Khoiri, Q. (2025). Perbandingan tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, dan lingkungan sistem pendidikan Islam dengan pendidikan kolonial Belanda. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 22(1).
- Nugroho, R. (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, visi, dan strategi*. Pustaka Pelajar.
- Nursalim. (2018). *Ilmu pendidikan: Suatu pendekatan teoritis dan praktis*. Rajawali Pers.
- Pakar, S. I. (n.d.). *Pendidikan dan pesantren*.
- Siregar, E. (2016). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan kaum bangsawan di Indonesia (1900–1920). *Jurnal Education*, 3(1), 21–26.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). *Sejarah pendidikan Indonesia (Era pra kolonialisme Nusantara sampai reformasi)*. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Van Niel, R. (1960). *The emergence of the modern Indonesian elite*. W. van Hoeve Ltd.
- Yumnah, S., Hendra, Safitri, A., Sukino, A., Mansyur, Ningrum, V. A., Hawa, A. M., Umro, J., Fauzi, A., & Muhyin, N. F. (2025). *Dinamika pendidikan Islam kontemporer* (1st ed.). PT Pena Cendekia Pustaka.